



## Anggaran Pilkada 'Dibagi-bagi'

★ Untuk PPK Rp 1,8 M dan PPS Rp 6 M

MANGUPURA, NusaBali

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Badung mengalokasikan anggaran untuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Badung sebesar Rp 1,8 miliar dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di 62 desa/kelurahan sebesar Rp 6 miliar. Dalam pengelolaan anggaran tersebut KPU Badung mewanti-wanti agar dilakukan secara transparan sehingga penggunaannya tidak menyalahi ketentuan.

"Total anggaran di KPU itu Rp 19,5 miliar. Dari anggaran untuk PPK dan PPS semuanya bersumber dari sana," kata Ketua KPU Badung AA Gede Raka Nakula, Kamis (30/7) kemarin.

Setelah mendapatkan gelontoran anggaran, KPU Badung bekerjasama dengan KPU Provinsi dan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pem-

angunan) Provinsi Bali memberikan bimbingan teknis (bimtek) khusus untuk menyamakan persepsi terkait pengelolaan anggaran pilkada. "Kami berharap melalui bimtek pengelolaan anggaran bisa transparan melalui mekanisme rapat koordinasi antara panitia ad hoc dengan sekretariat," jelasnya. "Hal ini sangat penting agar kegiatan tahapan dapat berjalan dengan lancar dan," imbuh Nakula. PPK dan PPS yang mengikuti bimtek di Hotel Made Bali, Rabu (29/7) sebanyak 216 orang.

Menurut pria asal Gianyar tersebut, Rancangan Kegiatan Anggaran (RKA) sudah dibagikan dan dipegang bersama oleh panitia dan sekretariat sebagai bahan acuan dalam pengelolaan kegiatan.

"Harapan kami dengan transparansi dalam pengelolaan anggaran ini target kami untuk

sukses dalam penyelenggaraan Pilkada. Kegiatan ini sebagai implementasi asas penyelenggara terlebih kita sebagai pilot project pendampingan KPK untuk pemilu yang berintegritas," tandasnya.

Bagaimana dengan untuk anggaran sosialisasi, Alat Peraga Kampanye (APK), dan kertas suara? Nakula menegaskan untuk masalah tersebut menjadi tanggung jawab KPU Badung. "Honor, ATK, sosialisasi, dan surat suara ditanggung KPU," kata dia sembari mengaku tidak hafal perinciannya.

"Intinya Rp 19,5 miliar anggaran Pilkada Badung untuk seluruh kegiatan KPU Badung, baik untuk gaji, logistik, sosialisasi, ATK. Jadi seluruh penyelenggara anggaran dari KPU, di PPK, PPS, PPDP, KPPS, dan linmas," tandasnya.  as

Edisi : Jumat 31 Juli 2015

Hal : 2



# Geredeg Titip Tunggakan

## Proyek Terbengkalai

★ Minta Tuntaskan Dermaga Pesiar dan Pelabuhan Amed

Pembangunan Dermaga Kapal Pesiar Ampo dan Pelabuhan Amed itu molor sejak dimulai 2006 silam lantaran berlangsung alot dan tarik menarik pendanaan dari pusat, dan kini terbengkalai.

AMLAPURA, NusaBali

Mantan Bupati Karangasem I Wayan Geredeg menitip-tunggakan pembangunan proyek raksasa yang digagas selama masa pemerintahannya, kepada siapapun yang nanti akan menggantikannya. Dua proyek berskala besar itu, masing-masing lanjutan pembangunan Dermaga Kapal Pesiar Tanah Ampo di Desa Ulakan, Kecamatan Manggis, dan rencana pembangunan Pelabu-



● NUSABALI/NANTRA  
PENJABAT Bupati IB Ngurah Arda, di acara perpisahan mantan Bupati I Wayan Geredeg di Ruang DPRD, Kamis (30/7).

han Amed, Desa Purwekerti, Kecamatan Abang.

Sebab, selama dua periode menjabat Bupati Karangasem 2005-2010, dan 2010-2015, kedua agenda itu belum kunjung tuntas. Geredeg memaparkan hal itu dalam sambutan di acara perpisahannya dengan Penjabat Bupati Karangasem Ida Bagus Ngurah Arda di Ruang

Rapat DPRD Karangasem, Kamis (30/7).

Geredeg menyadari, selama membangun Dermaga Kapal Pesiar berlangsung alot dan tarik menarik soal anggaran yang bersumber dari pusat. Sehingga penyelesaiannya molor. Pembangunan berawal tahun 2006, target tuntas tahun 2010, bahkan hingga berakhir masa jabatannya

Edisi : Jumat, 31 Juli 2015

Hal : 8



sambungan - - -

21 Juli 2015, tetap terbengkalai. "Itulah sebabnya, kami menitip kepada siapapun Bupati Karangasem nanti yang terpilih, agar tetap melanjutkan program itu, kami siap membantu, baik secara politik maupun tenaga ikut melobi pusat," jelas Geredeg.

Sedangkan rencana Pembangunan Pelabuhan Amed, untuk mendekatkan pelayaran di Selat Lombok, menuju Pelabuhan Lembar katanya, telah tuntas FS (feasibility study) dan DED (Detail Engineering Design) atau perencanaan detail mengenai teknis pembangunan.

Sedangkan kata Geredeg mengenai pengoperasian proyek air baku yang bersumber dari Sungai Telaga Waja, tinggal mengalirkan airnya, secara teknis pemasangan pipa telah kelar. "Persoalannya yang terjadi terletak pada lembaga yang mengoperasikan," katanya.

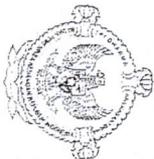
Geredeg merasakan, selama 10 tahun memimpin Karangasem berlalu begitu cepat. Sebab, masih banyak ide, gagasan dan inovasi yang mesti diperbuat. Mulai dari mengawali memimpin

Karangasem dengan Wakil Bupati I Gusti Lanang Rai tahun 2005-2010, hingga didampingi Wakil Bupati I Made Sukerana. Mulanya APBD 2005 sebesar Rp 205 miliar, hingga mencuat tahun 2015 menjadi Rp 1,2 triliun. Hal itu berkat perjuangan ke pusat menggali dana sebanyak mungkin.

"Makanya, jangan diartikan ke pusat mengemis anggaran. Tetapi anggaran di pusat merupakan hak kabupaten," tambahnya.

Penjabat Bupati IB Ngurah Arda mengaku salut atas kepemimpinan I Wayan Geredeg sebelumnya yang banyak inovasi dan prestasi. "Selayaknya keberhasilan pemimpin sebelumnya berlanjut, agar Karangasem lebih maju dan warga masyarakatnya sejahtera," pinta IB Ngurah Arda.

Hadir di acara itu, Ketua DPRD I Nengah Sumardi, mendampingi Pejabat IB Ngurah Arda, juga duduk berjejer I Wayan Geredeg dan I Made Sukerana. Sedangkan Wakil Ketua DPRD I Made Wirta, Ida Bagus Adnyana, Sekba I Gede Adnya Muliadi duduk di meja anggota dewan. **k16**



## Proyek Reklamasi Muncul di Bungkulan

**SINGARAJA** – Proyek yang menyerupai reklamasi, kini muncul di Desa Bungkulan, Kecamatan Sawan. Proyek itu berusaha menambah luas lahan yang sudah ada, dan dimanfaatkan sebagai halaman vila yang sudah berdiri di tepi pantai Desa Bungkulan.

Proyek itu berada di Banjar Dinas Badung, Desa Bungkulan, Kecamatan Sawan. Di sekitar lokasi proyek, telah berdiri tiga buah villa. Proyek semi reklamasi itu memiliki panjang hingga 500 meter, dan menjorok ke arah laut hingga lima meter.

Konon senderan itu sengaja dibangun dan direncanakan untuk memperluas lahan di sekitar

villa. Ironisnya pasir pantai yang ada di senderan sempat dikeruk, dan kini digantikan dengan tanah urug. Proyek itu konon dikerjakan warga setempat yang bernama I Made Ardana.

Kasi Trantib Kecamatan Sawan, Ketut Puguhyasa yang dihubungi petang kemarin, membenarkan adanya proyek itu. Puguhyasa mengatakan pihaknya sudah turun ke lokasi. Ia menyebutkan jika proyek memakan areal sempadan pantai, dan belum mengantongi izin.

“Belum ada izinnya itu. Tadi (kemarin) pagi saya dengan rekan-rekan polisi sempat ke lokasi. Penanggungjawabnya juga sudah ketemu,” kata Pu-

guhyasa melalui sambungan telepon. Ia memastikan proyek telah dihentikan sampai dengan

waktu yang tak ditentukan. Ia meminta agar pengelola proyek tidak melakukan aktifitas da-

lam bentuk apapun, sampai mengantongi perizinan yang dibutuhkan. (eps/gup)

Edisi : Jumat, 31 Juli 2015

Hal. : 29